RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki *trend* yang positif . Hal tersebut bertolak belakang dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 sampai dengan 2018 memiliki indeks gini tertinggi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi yang dicapai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dinikmati secara merata oleh penduduknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kredit konsumsi, kredit modal kerja, infrastruktur ekonomi, kesempatan kerja, inflasi dan pariwisata terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mengunakan sekunder runtun waktu tahun 2007-2018. Metode penelitian mengunakan regresi linier berganda dengan mengunakan data penel dalam kurun waktu 2007-2018 dan 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit konsumsi dan infrastruktur ekonomi berpengaruh positif dan siginifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2018. Sementara itu, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhdap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-201. Kesempatan kerja dan pariwisata tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2018.

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa 1) lembaga keuangan dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengevaluasi dan mengkontrol dalam penyaluran kredit konsumsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) pemerintah harus mengkaji ulang mengenai pembangunan infrastruktur jalan apakah hanya difokuskan di perkotaan atau perdesaan. Apabila pembangunan infrastruktur di perkotaan tentunya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan semakin parah, namun apabila pembangunan difokuskan di perdesaan tentunya akan mempersempit ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur tanpa dibarengi dengan daya saing yang kuat dari masyarakat miskin hanya akan menguntungkan masyarakat yang kaya dan semakin memperlebar jarak ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. 3) Bank Indonesia regional Yogyakarta dan pemerintah daerah harus berkoordinasi dalam mengendalikan tingkat inflasi dan harus memperhitungkan target inflasi yang baik, karena dengan adanya inflasi juga akan mendorong kinerja perekonomian daerah.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Kredit, Infrastruktur.

SUMMARY

Economic growth in Special Region Province of Yogyakarta has a positive trend. This was in contrast to income inequality in this place since 2014 to 2018 which had the highest Gini index in Indonesia. This fact showed that the results of economic development achieved in this place have not been enjoyed equally by the population. This study aimed to analyze the effect of consumption credit, working capital credit, economic infrastructure, employment opportunities, inflation and tourism on the level of income inequality in Special Region Province of Yogyakarta. This type of research used qualitative and it conducted by using secondary time series 2007-2018. The method of this research used multiple linear regression and it conducted by using the data from 2007-2018 and 5 districts / cities in Yogyakarta Province including Sleman Regency, Gunung Kidul Regency, Bantul Regency, Kulon Progo Regency, Yogyakarta City.

The results showed that consumption credit and economic infrastructure had a positive and significant effect on income inequality in the Yogyakarta Special Region in 2007-2018. Furthermore, inflation has a negative and significant effect on income inequality in this place since 2007-2018. Moreover,job opportunities and tourism have no effect on income inequality in this place since 2007-2018.

The findings of this research implied several kinds of description, they were ; 1) financial institutions and local governments that expected to be able to evaluate and control the distribution of consumption credit in Yogyakarta. 2) the government reviewed the road infrastructure development, whether it was only focused on urban or rural areas. If infrastructure development in urban areas will certainly increase income inequality, it will get worse, but if the development is focused on rural areas, it will certainly narrow income inequality in this place. If the infrastructure development is accompanied without the strong competitiveness by the poor people level it will only benefit for the rich people level and further widen the gap in income inequality in society. 3) The Yogyakarta regional Bank Indonesia and the regional government must cooperate in controlling the inflation rate and must take it into account a good inflation target, because inflation will also boost regional economic performance.

Keywords: Income Inequality, Credit, Infrastructure.